

IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN

Sylla Indah Ning Rahayu^{1*}, Siska Yulia Weny²

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri^{1,2}

E-mail: syllaindahningrahayu@gmail.com*

Article History	Received	Accepted	Published
	2026-03-13	2026-04-06	2026-04-17

Abstrak

Pengelolaan keuangan madrasah merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Manajemen keuangan mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di MTsN 2 Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi kepala madrasah, bendahara, dan kepala tata usaha. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, waktu, dan metode, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perencanaan keuangan dilakukan secara sistematis melalui evaluasi diri madrasah sebagai dasar penyusunan RKAM; (2) pelaksanaan keuangan berjalan sesuai rencana dan disertai laporan pertanggungjawaban; dan (3) evaluasi dilakukan melalui mekanisme internal dan eksternal untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi.

Kata Kunci: akuntabilitas, manajemen keuangan, transparansi

Abstract

Madrasah financial management is an important aspect in achieving effective and sustainable educational goals. Financial management includes planning, implementation, evaluation, and reporting that are carried out transparently and accountably in accordance with laws and regulations. This is in line with Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System which emphasizes the principles of fairness, efficiency, transparency, and accountability. This study aims to determine the planning, implementation, and evaluation as an effort to improve the accountability and transparency of financial management at MTsN 2 Kediri City. This study uses a qualitative approach with field research through interview, observation, and documentation techniques. The research subjects include the madrasah principal, treasurer, and head of administration. Data validity is tested through triangulation of sources, time, and methods, while data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that: (1) financial planning is carried out systematically through madrasah self-evaluation as a basis for preparing the RKAM; (2) financial implementation is



running according to plan and is accompanied by accountability reports; and (3) evaluation is carried out through internal and external mechanisms to ensure compliance with regulations.

Keywords: *accountability, financial management, transparency*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha yang terencana dan terorganisasi dalam membentuk keterampilan serta kepribadian individu (Iwan Sopwandin et al., 2020). Peningkatan kualitas kehidupan bangsa tidak dapat dilepaskan dari peran pendidikan sebagai sarana dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten, berkualitas, dan mampu bersaing. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Bab II Pasal 3, yang menegaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, serta memiliki keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat (Unida Gontor et al., 2023). Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kualitas diri secara menyeluruh.

Perkembangan pendidikan yang optimal dalam suatu bangsa dapat dilihat dari keselarasan antara keterlaksanaan pendidikan dan tujuan yang telah ditetapkan di awal (Heliani et al., 2022). Dalam konteks tersebut, aspek keuangan menjadi komponen penting yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan. Secara ekonomis, proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan pembiayaan yang memadai (Arifudin et al., 2021.). Oleh karena itu komponen keuangan dalam lembaga pendidikan harus dikelola secara optimal. Dalam sebuah lembaga pendidikan, manajemen keuangan dapat diartikan sebagai kemampuan madrasah dalam mengelola dana secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengelolaan tersebut mencakup berbagai tahapan, mulai dari pencatatan dan perencanaan, pelaksanaan penggunaan anggaran, hingga pertanggung jawaban serta pelaporan. Seluruh rangkaian ini harus dilakukan secara jujur, terbuka, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar kepercayaan publik tetap terjaga. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan, termasuk aspek pembiayaan, harus berlandaskan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (Hidayatun & Hanif, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang sistematis mampu meningkatkan akuntabilitas lembaga pendidikan. Kurniati dan Hanif (2024) di SD Negeri Semboja 02 Tegal menemukan pentingnya kolaborasi kepala sekolah dan bendahara dalam membangun sistem transparan (Kurniati & Hanif, 2024). Penelitian Reni Situmorang dkk. (2024) di SMK Negeri 1 Sidikalang menegaskan penerapan fungsi manajemen keuangan berbasis perencanaan dan pelaporan (Manullang, n.d.). Moh. Nur Fauzi dan Desi Priska Rahma Suci (2022) menunjukkan implementasi akuntabilitas yang baik di MA Al-Amiriyah Blokagung Banyuwangi (Fauzi & Suci, 2023), sementara Nursan Safitri dkk. (2025) menekankan mekanisme partisipatif di SMK Muhammadiyah Wonomulyo (Safitri et al., n.d.). Penelitian Nurul Widiana Amin dkk. (2022) juga

menyoroti transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada tingkat sekolah dasar (Nurul Widiana Amin et al., 2022).

Namun demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek manajerial konvensional tanpa mengaitkan secara mendalam dengan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Di sisi lain, fakta empiris menunjukkan masih adanya permasalahan berupa lemahnya perencanaan berbasis kebutuhan, kurangnya transparansi laporan, serta minimnya evaluasi berbasis kinerja (Jasmine, 2023). Selain itu, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, lemahnya pengawasan internal, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi turut memengaruhi rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan. Ketidakjelasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang tidak dapat diakses oleh pemangku kepentingan juga menjadi permasalahan yang berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pendidikan. Hal ini mampu mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan madrasah dan menghambat partisipasi dari berbagai pihak dalam mendukung program pendidikan (Jasmine, 2023). Dalam rangka memastikan pengelolaan keuangan sekolah atau madrasah berjalan secara efektif harus berpedoman kepada fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Thomas H. Jones yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Unida Gontor et al., 2023).

Prinsip akuntabilitas merupakan penggunaan dana lembaga pendidikan yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan perencanaan dan peraturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan harus bersifat transparan. Transparan dalam hal ini didefinisikan sebagai keterbukaan informasi dan data mengenai sumber keuangan, daftar penggunaan keuangan, dan pertanggung jawaban yang jelas atas penggunaan keuangan dalam rangka memudahkan pemahaman bagi pihak yang berwenang (Hidayatun & Hanif, 2024). Menurut Departemen Pendidikan Nasional, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan keuangan di suatu instansi termasuk dalam pengelolaan keuangan. Kegiatan tersebut meliputi tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan penggunaan dana, pertanggungjawaban, hingga penyusunan laporan keuangan. Dengan pengelolaan yang baik dan terstruktur, penggunaan dana dapat berjalan lebih efektif, transparan, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku (Jasmine, 2023).

Merujuk pada hasil pra-observasi, MTsN 2 Kota Kediri merupakan madrasah berakreditasi A dengan berbagai prestasi akademik dan non-akademik. Madrasah ini juga menunjukkan kemajuan dalam implementasi sistem pembayaran non tunai melalui aplikasi Digipay Satu di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, sehingga memperoleh apresiasi dari Kantor Pelayanan Pajak atas penerapan sistem transaksi yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Kurikulum menguatkan temuan peneliti bahwa untuk pengelolaan keuangan di MTsN 2 Kota Kediri dilakukan secara maksimal untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, sekaligus mendukung gerakan nasional menuju masyarakat yang lebih inklusif secara finansial.

Penelitian ini bertujuan untuk mendukung sekaligus memperluas temuan sebelumnya dengan menghadirkan analisis kontekstual pada MTsN 2 Kota Kediri yang telah mengimplementasikan sistem pembayaran non-tunai Digipay Satu di bawah koordinasi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif fungsi manajemen keuangan yang dikaitkan dengan praktik digitalisasi pembayaran dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan latar belakang, kesenjangan, dan posisi penelitian tersebut, tujuan artikel ini adalah: (1) mendeskripsikan perencanaan keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi; (2) menganalisis pelaksanaan perencanaan keuangan; dan (3) mengevaluasi mekanisme pengawasan keuangan dalam mendukung tata kelola madrasah yang akuntabel dan transparan.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan (Ahmad & Laha, 2020). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Dalam hal ini, peneliti tidak bertindak sebagai informan, melainkan sebagai pengumpul data, sedangkan informan penelitian terdiri atas kepala madrasah, bendahara, dan kepala tata usaha.

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Kediri, yang beralamatkan di Jl. Sunan Ampel No. 12, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri. Pemilihan MTsN 2 Kota Kediri sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan dan berdasarkan hasil pra-observasi pertama bahwasannya MTsN 2 Kota Kediri memiliki keunggulan bidang manajemen khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Keunggulan tersebut ditunjukkan madrasah dengan diperolehnya prestasi dan penghargaan anugerah terbaik pengelolaan keuangan yang diberikan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak setempat pada tanggal 27 Juli 2023 sebagai upaya madrasah dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien melalui penggunaan Digipaysatu sebagai alat pembayaran non tunai.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak dapat dilepaskan dari fakta atau informasi (Haryono, 2021.). Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan kepala madrasah, bendahara, dan kepala tata usaha, serta observasi terhadap proses pengelolaan keuangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM), laporan pertanggungjawaban, arsip keuangan, serta literatur yang relevan. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, lembar observasi (*checklist*), dan pedoman dokumentasi (A. Nur & Utami, 2022). Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, waktu, dan metode, dengan tujuan untuk membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data (Sutikno & Hadisaputra, 2020). Adapun triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, waktu, dan metode. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan, penyajian data

dilakukan dalam bentuk deskriptif naratif dan tabel agar mudah dipahami, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan berdasarkan temuan di lapangan. Adapun prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) tahap pra-lapangan, meliputi penyusunan proposal dan studi pendahuluan; (2) tahap pengumpulan data, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi; (3) tahap analisis data, yang dilakukan secara simultan sejak awal pengumpulan data; dan (4) tahap penyusunan laporan, yaitu merumuskan hasil dan pembahasan penelitian secara sistematis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus penelitian yang dilaksanakan di MTsN 2 Kota Kediri adalah pada penerapan manajemen keuangan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, diperoleh temuan bahwa pengelolaan keuangan madrasah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang saling terhubung. Rangkaian tahapan tersebut berjalan secara sistematis dan terstruktur, serta mencerminkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan modern dalam mewujudkan tata kelola yang efektif dan bertanggung jawab.

Hasil Penelitian

Perencanaan Keuangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan di MTsN 2 Kota Kediri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan keuangan di MTsN 2 Kota Kediri dilakukan melalui Evaluasi Diri Madrasah (EDM). Kegiatan ini melibatkan kepala madrasah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), wakil kepala madrasah, Kepala Tata Usaha, pelaksana kegiatan, serta komite madrasah. Melalui EDM, madrasah mengidentifikasi kondisi riil, kelemahan, serta kebutuhan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Hasil EDM kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Madrasah (RKM) dan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM). Selain itu, dalam proses perencanaan dilakukan rapat bersama yang melibatkan berbagai pihak untuk menentukan skala prioritas program. Sumber dana berasal dari dana BOS dan partisipasi masyarakat, yang dialokasikan sesuai kebutuhan utama pembelajaran.

Pelaksanaan Perencanaan Keuangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan di MTsN 2 Kota Kediri

Pelaksanaan keuangan di MTsN 2 Kota Kediri dilakukan dengan berpedoman pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam RKAM. Proses pencairan dana dilakukan melalui mekanisme berjenjang, mulai dari pengajuan proposal kegiatan, persetujuan pimpinan, hingga pencairan oleh bendahara. Seluruh transaksi dicatat menggunakan sistem digital seperti SAKTI, OMSPAN, dan MONSAKTI. Pelaporan keuangan dilakukan secara berkala (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan) yang dilengkapi dengan dokumen seperti laporan pertanggungjawaban (LPJ), laporan rekening, buku kas umum (BKU), serta dokumen pendukung lainnya. Sebagai contoh, pada kegiatan lomba ALODYA tahun 2025,

sumber dana berasal dari dana BOS dan dana komite dengan pembagian penggunaan yang jelas serta penanggung jawab yang teridentifikasi.

Evaluasi Pelaksanaan Keuangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan di MTsN 2 Kota Kediri

Evaluasi keuangan di MTsN 2 Kota Kediri dilakukan melalui mekanisme internal dan eksternal. Evaluasi internal dilakukan melalui rapat rutin mingguan dan bulanan oleh kepala madrasah bersama tim manajemen untuk meninjau pelaksanaan anggaran. Evaluasi eksternal dilakukan oleh KPPN melalui penilaian IKPA serta audit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Evaluasi ini menilai kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Selain itu, evaluasi juga dilakukan dengan menilai efektivitas penggunaan anggaran. Program yang dinilai kurang efektif akan menjadi bahan perbaikan pada perencanaan berikutnya.

Pembahasan

Perencanaan Keuangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan di MTsN 2 Kota Kediri

Perencanaan atau penganggaran (*budgetting*) adalah tahap awal yang dilakukan untuk mengenali berbagai kebutuhan suatu instansi atau lembaga. Dalam proses ini ditentukan tujuan kegiatan, lokasi pelaksanaan, waktu, durasi, serta cara pelaksanaannya. Pada tahap perencanaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan keuangan di MTsN 2 Kota Kediri dilaksanakan secara sistematis melalui Evaluasi Diri Madrasah (EDM) yang melibatkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), wakil kepala madrasah, Kepala Urusan Tata Usaha (KTU), pelaksana kegiatan, serta komite madrasah. Selain itu kegiatan Evaluasi Diri Madrasah juga digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan, kemampuan, serta kesenjangan mutu berbasis Standar Nasional Pendidikan sehingga program dan anggaran yang dirumuskan berangkat dari kebutuhan riil madrasah. Proses ini menegaskan bahwa perencanaan tidak dilakukan secara administratif semata, melainkan diawali dengan analisis kondisi dan capaian mutu sebagai dasar penyusunan program. Pada dasarnya, EDM merupakan bentuk penilaian yang dilakukan oleh seluruh warga madrasah dengan penuh kesadaran dan kejujuran. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Dirjen Pendis pada tahun 2021. Penilaian tersebut bertujuan untuk mendorong perbaikan serta peningkatan mutu pendidikan madrasah secara berkelanjutan, sehingga kualitas layanan pendidikan dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku (Aprizal, 2023).



Gambar 1. Kegiatan Evaluasi Diri Madrasah

Selanjutnya, hasil identifikasi melalui Evaluasi Diri Madrasah akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Madrasah (RKM) hingga perumusan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) secara terstruktur dan berjenjang. Alur tersebut menunjukkan bahwa fungsi perencanaan telah berjalan sesuai konsep Thomas H. Jones yang menegaskan bahwa perencanaan merupakan proses awal dalam mengoordinasikan sumber daya secara metodis untuk mencapai tujuan secara efektif (2013). Dengan demikian, perencanaan berbasis evaluasi menjadi fondasi akuntabilitas karena setiap alokasi anggaran memiliki dasar analisis yang jelas dan sistematis. Untuk memperkuat argumentasi tersebut, berikut disajikan skema penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan yang menggambarkan secara visual alur metodis dan terstruktur dalam proses koordinasi sumber daya secara sistematis dalam mencapai tujuan lembaga.



Gambar 1. Skema Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan di MTsN 2 Kota Kediri

Dari sisi prinsip perencanaan MTsN 2 Kota Kediri menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi melalui pelibatan kepala madrasah, bendahara, tim manajemen, dan komite dalam rapat penyusunan RKAM. Praktik ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 ayat (1) serta pandangan Tangkudung (2013) tentang pentingnya keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana pendidikan (Huriyah, 2023). Dana yang bersumber dari pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah dan partisipasi masyarakat dikelola berdasarkan skala prioritas

dengan menempatkan kebutuhan pembelajaran sebagai fokus utama. Ketentuan tersebut juga sesuai dengan amanat Permendiknas No. 69 Tahun 2009 yang mengatur tentang standar biaya operasional selain pegawai. Peraturan ini menjelaskan bahwa biaya tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan operasional penunjang dalam satu tahun anggaran, sehingga pelaksanaan program pendidikan dapat berjalan secara efektif dan terencana (Halim, 2018). Artinya prinsip penentuan skala prioritas di MTsN 2 Kota Kediri mencerminkan penerapan teori efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pendidikan yang diarahkan untuk mendukung proses pembelajaran secara berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan utama peserta didik. Selain itu hal tersebut juga selaras dengan teori yang tercantum dalam buku manajemen sekolah atau madrasah yang ditulis oleh H.Saeful Uyun bahwa perencanaan manajemen keuangan yang disusun dalam bentuk program kerja berangkat dari hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM). Selanjutnya, capaian tersebut dibandingkan dengan Standar Layanan Minimal (SLM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk melihat tingkat kesesuaiannya. Selain itu menurut H. Saeful Uyun, melalui proses perbandingan tersebut dapat dilakukan analisis kesenjangan guna mengidentifikasi kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Dari hasil analisis inilah kemudian ditetapkan program-program prioritas sebagai langkah strategis dalam meningkatkan mutu madrasah (Uyun et al., 2020).

Kemudian hal tersebut juga sejalan dengan pandangan Abdullah yang menyebutkan bahwa keuangan pendidikan bersifat publik sehingga harus dikelola secara terbuka (Wahyudin, 2021), serta teori Rofiq mengenai pentingnya efisiensi dalam keterbatasan sumber daya (Sumual, 2023.). Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya tentang pentingnya partisipasi stakeholder, sekaligus menunjukkan nilai tambah berupa integrasi perencanaan berbasis evaluasi mutu secara terstruktur dan berkelanjutan. Perencanaan keuangan di MTsN 2 Kota Kediri telah menerapkan prinsip tata kelola yang baik dengan berlandaskan pada nilai transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Melalui penerapan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel tersebut menjadi wujud tanggung jawab madrasah terhadap publik, baik kepada pemerintah maupun masyarakat.

Pelaksanaan Perencanaan Keuangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan di MTsN 2 Kota Kediri

Pelaksanaan keuangan merupakan proses penerimaan dan penggunaan keuangan madrasah, dan setiap transaksi penggunaan keuangan tersebut harus dicatat dan dikelompokkan dengan baik. Pelaksanaan pengelolaan keuangan madrasah tersebut bertujuan untuk memberikan keefektifan dan efisiensi penggunaan keuangan madrasah, memberikan informasi akurat, dan menjamin adanya akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan keuangan yang sudah dikeluarkan (Kodir, 2022). Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan perencanaan keuangan di MTsN 2 Kota Kediri dilaksanakan secara sistematis, transparan, dan akuntabel dengan berpedoman pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai acuan utama realisasi anggaran. Seluruh kegiatan mengacu pada regulasi resmi seperti Juknis BOS, PMK tentang Standar Biaya Masukan (SBM), PMA, KMA, serta ketentuan perbendaharaan negara lainnya. DIPA berfungsi sebagai ukuran finansial yang

memuat alokasi dana untuk setiap program dalam satu periode anggaran, sehingga memudahkan pengendalian dan evaluasi kinerja keuangan. Hal ini selaras dengan pendapat Mardiasmo bahwa pelaksanaan anggaran merupakan estimasi kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Rahayuningsih & Syaflan, n.d.). Melalui DIPA, setiap program dan kegiatan memiliki alokasi dana yang jelas sehingga memudahkan proses pengendalian dan evaluasi keuangan dari jangka pendek, menengah, dan juga panjang. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa setiap pelaksanaan anggaran yang bersangkutan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dimulai dengan penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran yang disebut sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (Nuriah, 2023).

Setiap pengeluaran dilakukan melalui mekanisme proposal berjenjang, mulai dari pengajuan pembina kegiatan, persetujuan wakil kepala madrasah, telaah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga pencairan oleh bendahara. Seluruh transaksi dicatat dalam sistem digital seperti SAKTI, OMSPAN, dan MONSAKTI sehingga dapat dipantau oleh pihak internal maupun eksternal seperti KPPN dan Kementerian Agama. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwasannya pelaksanaan manajemen keuangan madrasah bertujuan untuk memberikan keefektifan dan efisiensi penggunaan keuangan madrasah, memberikan informasi akurat, dan menjamin adanya akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan keuangan yang sudah dikeluarkan (Kodir, 2022). Transparansi dan akuntabilitas di MTsN 2 Kota Kediri diwujudkan dengan sistem pelaporan yang terbuka melalui penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan yang dilengkapi LPJ, laporan rekening, saldo, BKU, ADK, serta dokumen pendukung lainnya. Praktik ini mencerminkan konsep akuntabilitas menurut Halim dan Kusufi yang membedakan antara akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal (Bagus Setiawan & Shaleh, 2023). Akuntabilitas vertikal terlihat dari pertanggungjawaban madrasah kepada otoritas yang lebih tinggi secara struktural, seperti Kementerian Agama dan KPPN, melalui pelaporan sesuai prosedur. Sementara itu, akuntabilitas horizontal tercermin dari keterbukaan informasi kepada masyarakat, komite, dan wali murid sebagai stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan dana pendidikan.

Tabel 1. Realisasi Dana BOS dan Komite MTsN 2 Kota Kediri dalam Kegiatan Lomba Ajang Palang Merah Remaja Madya (ALODYA) Tahun 2025

Dana	Penggunaan	Terealisasi	Pelaporan	Penanggung Jawab
BOS	Belanja perlengkapan lomba ALODYA dan honor pelatih	07 Agustus 2025	Terlaksana	Jaenal Abidin, S.Pd. (Waka Kesiswaan)
Komite	Honorarium panitia, dan driver	11 Agustus 2025	Terlaksana	Jaenal Abidin, S.Pd. (Waka Kesiswaan)

Implementasi mekanisme tersebut dapat dilihat pada realisasi penggunaan dana kegiatan lomba ALODYA sebagaimana tercantum pada Tabel 1. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara madrasah, diketahui bahwa pendanaan kegiatan tersebut bersumber dari Dana BOS dan Dana Komite. Dana BOS dialokasikan untuk belanja perlengkapan lomba dan honor pelatih dengan kisaran nominal sekitar Rp 2.423.000,00,

sedangkan Dana Komite digunakan untuk honorarium panitia pelaksana serta biaya transportasi (driver) dengan kisaran sekitar Rp 6.750.000,00. Total keseluruhan anggaran yang digunakan mencapai kurang lebih Rp 9.173.000,00. Pembagian sumber dana yang jelas, rincian penggunaan, waktu realisasi, serta penanggung jawab kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai peruntukan dan terdokumentasi secara tertib. Hal ini memperkuat praktik akuntabilitas vertikal karena dapat dilaporkan kepada otoritas yang berwenang, sekaligus akuntabilitas horizontal karena informasinya terbuka bagi stakeholder internal dan eksternal.

Sebagaimana dijelaskan oleh Siswanto, secara teoritis transparansi keuangan di lembaga pendidikan dapat membangun kepercayaan (*trust*) yang bersifat timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah. Kepercayaan tersebut tercipta melalui penyediaan informasi yang terbuka, akurat, dan memadai, serta adanya jaminan kemudahan bagi para pihak untuk mengakses informasi tersebut. Dengan demikian, keterbukaan keuangan menjadi dasar penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan akuntabel di lingkungan pendidikan (2013), sedangkan Sutedjo menegaskan bahwa akuntabilitas bertujuan menilai kinerja lembaga dan mempertanggungjawabkan dana kepada seluruh *stakeholder* (2013). Pelaporan yang terdokumentasi dan terintegrasi secara digital juga sejalan dengan pandangan Mulyadi bahwa laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban atas transaksi dalam periode tertentu (Zamrud, n.d.). Dengan demikian, pelaksanaan dan pelaporan keuangan di MTsN 2 Kota Kediri tidak hanya memenuhi ketentuan regulatif, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip *good financial governance* yang efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horizontal.

Adapun beberapa lampiran dokumen administrasi yang digunakan oleh bendahara MTsN 2 Kota Kediri sebagai laporan pertanggung jawaban yaitu laporan pertanggungjawaban (LPJ), laporan rekening bulanan, laporan saldo rekening bulanan, berita acara pelaporan bulanan, rekening koran bulanan, konfirmasi pendapatan bulanan, Buku Kas Umum (BKU) beserta buku bantu lainnya, serta ADK. Laporan-laporan tersebut memiliki fungsi penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan madrasah. Selain itu, keberadaan laporan juga menjadi bukti administratif yang sah atas setiap transaksi yang telah dilakukan, sehingga seluruh penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan tertib. Sesuai dengan teori Munawir bahwa fungsi pelaporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama jangkauan waktu yang dibuat instansi sebagai alat pertanggung jawaban (Halim, 2018). Adapun upaya lain yang dilakukan MTsN 2 Kota Kediri dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya yaitu dengan memanfaatkan aplikasi Digipay Satu sebagai alat transaksi digital resmi. Melalui aplikasi ini, setiap proses pembayaran dilakukan secara elektronik sehingga lebih efisien, aman, dan mudah diawasi. Selain itu, penggunaan Digipay Satu juga membantu memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga pengelolaan keuangan madrasah berjalan lebih transparan dan akuntabel sesuai regulasi yang berlaku. Hal tersebut selaras dengan Munawir bahwa Transparansi mengacu pada penyajian informasi keuangan yang jelas, terbuka, dan mudah

dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi dalam hal ini juga melibatkan aksesibilitas informasi, sehingga pihak yang membutuhkan dapat dengan mudah mengakses laporan tersebut (Zamrud, n.d.).

Pengelolaan keuangan pada MTsN 2 Kota Kediri menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Jabatan KPA tersebut diemban secara *ex officio* oleh Kepala Madrasah sebagai pimpinan satuan kerja. Ketentuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh L. M. Herman yang menjelaskan bahwa KPA dijabat secara *ex officio* oleh kepala satuan kerja sebagai perpanjangan tangan Menteri atau pimpinan lembaga dalam melaksanakan kegiatan kementerian atau lembaga. Dalam pelaksanaannya, KPA juga memiliki kewenangan untuk menunjuk pejabat perbendaharaan lainnya guna mendukung tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan (Herman, 2022).

Evaluasi Pelaksanaan Keuangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan di MTsN 2 Kota Kediri

Evaluasi pengelolaan keuangan madrasah merupakan bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan madrasah terhadap penggunaan keuangan madrasah yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan (Sianturi, n.d.). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti evaluasi pelaksanaan keuangan di MTsN 2 Kota Kediri dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban madrasah terhadap penggunaan dana yang dikaitkan dengan tujuan yang telah direncanakan diawal. Secara konseptual, evaluasi dipandang sebagai proses yang digunakan untuk membuktikan dan menilai kesesuaian antara perencanaan anggaran, pengelolaan, serta pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan. Pandangan ini sebagaimana dikemukakan oleh Thomas H. Jones, yang menegaskan bahwa evaluasi berfungsi sebagai alat pengendalian dalam manajemen. Melalui evaluasi, suatu lembaga dapat mengetahui tingkat keberhasilan program yang dijalankan sekaligus mengidentifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki, sehingga proses pengelolaan dapat terus ditingkatkan secara lebih efektif dan efisien (Rusdiana 2019). Sejalan dengan itu, evaluasi di MTsN 2 Kota Kediri dilakukan untuk meninjau penerimaan dan pemanfaatan dana agar lebih efektif, efisien, serta mencegah penyalahgunaan atau pemborosan. Hal ini sesuai dengan teori Amka yang menegaskan bahwa evaluasi bertujuan menilai pencapaian manajemen keuangan dalam menciptakan ketertiban administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan (A. F. Nur & Hanif, 2024).

Proses evaluasi di MTsN 2 Kota Kediri dilaksanakan secara internal dan eksternal untuk meninjau ketertiban proses administrasi. Evaluasi eksternal dilakukan oleh KPPN melalui penilaian IKPA setiap triwulan yang menilai aspek perencanaan, realisasi, dan pelaporan anggaran, serta audit oleh Inspektorat Jenderal sebagai bentuk pengawasan independen. Kehadiran pihak eksternal ini tidak hanya berfungsi sebagai penguji kebenaran data dan informasi keuangan, tetapi juga sebagai pemberi rekomendasi untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan di masa mendatang. Dengan demikian MTsN 2 Kota Kediri tidak hanya berfokus pada penyusunan laporan, tetapi juga pada upaya perbaikan berkelanjutan melalui identifikasi masalah dan tindak lanjut perbaikan. Praktik ini selaras dengan pendapat Subroto bahwa evaluasi mencakup analisis laporan keuangan, identifikasi

kecukupan sumber daya, perencanaan perbaikan, serta tindak lanjut hasil evaluasi (Aryanto 2024).



Gambar 2. Pendampingan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2021 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia

Gambar 3. menunjukkan kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia di MTsN 2 Kota Kediri. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses audit eksternal yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan keuangan madrasah dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain menilai kepatuhan administratif, evaluasi juga menilai output dari setiap penggunaan anggaran. Program yang dinilai kurang efektif atau tidak efisien menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan berikutnya. Hal ini sejalan dengan teori Fattah bahwa evaluasi meliputi pemeriksaan dokumen, deteksi penyimpangan, serta pembinaan atau penyesuaian jika ditemukan ketidaksesuaian (Halim, 2018). Proses pelaporan yang terdigitalisasi melalui SAKTI, OMSPAN, dan MONSAKTI memperkuat fungsi evaluatif karena memudahkan pemeriksaan dan pengawasan. Menurut Mulyadi, tahap evaluasi membantu lembaga pendidikan meningkatkan kinerja keuangan dan pencapaian tujuan secara berkelanjutan (Zamrud, n.d.). Dengan demikian, evaluasi pengelolaan keuangan di MTsN 2 Kota Kediri tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan yang mencerminkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola madrasah.

Sementara itu, evaluasi internal dilakukan oleh pihak madrasah yaitu melalui rapat mingguan dan bulanan yang dipimpin oleh Kepala Madrasah bersama waka dan Kepala Tata Usaha melalui forum review kurikulum, yang menelaah pelaksanaan anggaran berdasarkan azas manfaat, azas prioritas, azas efektif, dan efisien. Sejalan dengan teori yang ada, dalam proses evaluasi setiap kegiatan kepala madrasah memegang peranan yang sangat penting. Ia tidak hanya melakukan monitoring, tetapi juga membimbing serta memberikan pemahaman kepada setiap penanggung jawab kegiatan terkait penggunaan dan pengeluaran dana yang dibiayai. Melalui peran tersebut, kepala madrasah memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan anggaran tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta berjalan secara tertib dan bertanggung jawab. Evaluasi oleh kepala madrasah dilakukan dalam bentuk pengecekan program madrasah setiap triwulan atau

enam bulan sekali. Pertanggungjawaban ini dilakukan dalam rapat dewan madrasah yang diikuti komponen madrasah, masyarakat, dan pemerintah (Rusdiana 2019).



Gambar 3. Kegiatan Review Kurikulum di MTsN 2 Kota Kediri

Dalam proses pengelolaan keuangan, keterlibatan pihak eksternal maupun internal memiliki peran penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas laporan keuangan. Sebagai pimpinan lembaga, kepala madrasah MTsN 2 Kota Kediri memiliki peran sentral dalam memastikan seluruh proses pengelolaan dan pengawasan keuangan berjalan dengan transparan dan akuntabel. Hal tersebut dapat tergambar dari teori Arifuddin yang memparkan pelaksanaan manajemen keuangan pendidikan menerapkan prinsip pembagian tugas antara kepala sekolah dan bendahara. Kepala sekolah berperan sebagai pejabat publik yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terkait penerimaan serta pencairan dana madrasah. Sementara itu, bendahara bertanggung jawab dalam menerima, menyimpan, dan mengeluarkan dana, serta wajib melakukan pencatatan dan pertanggungjawaban atas setiap transaksi keuangan yang dilakukan (Widodo et al., 2023).

Melalui sistem pelaporan yang berjenjang dan terdigitalisasi melalui aplikasi SAKTI, OMSPAN, dan MONSAKTI yang dilakukan oleh pihak MTsN 2 Kota Kediri menjadi bukti bahwa teori yang dengan teori yang ada tersebut madrasah melaksanakan proses evaluasi keuangan yang berfokus pada pemeriksaan dokumen, deteksi penyimpangan, serta pembinaan untuk perbaikan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa madrasah tersebut berkomitmen terhadap prinsip evaluasi yang transparan, akuntabel, dan profesional sekaligus menjadi upaya nyata dalam menjaga kepercayaan masyarakat maupun pemerintah. Kemudian hal tersebut dipertegas dalam teori yang menyatakan bahwa audit internal bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan BOS telah sesuai dengan RKAM, serta memenuhi standar mutu dan efisiensi. Sedangkan audit eksternal dilakukan oleh pihak luar sekolah yang berwenang dan bertujuan untuk menilai kinerja madrasah dalam pengelolaan dana BOS, serta mengidentifikasi adanya penyimpangan, penyalahgunaan, atau korupsi dana BOS (Sianturi, n.d.).

D. SIMPULAN

Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan keuangan di MTsN 2 Kota Kediri telah dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan berbasis regulasi sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Secara runtut, perencanaan keuangan diawali melalui tahapan Evaluasi Diri Madrasah (EDM), yang kemudian menjadi dasar dalam

penyusunan Rencana Kerja Madrasah (RKM) dan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM). Proses ini menunjukkan bahwa setiap alokasi anggaran disusun berdasarkan analisis kebutuhan serta penetapan skala prioritas yang jelas dan terukur. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, penggunaan anggaran mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan mekanisme pengajuan proposal secara berjenjang serta pencatatan transaksi melalui sistem digital. Hal ini memperkuat sistem pengendalian internal sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Adapun pada tahap evaluasi, pengelolaan keuangan ditinjau melalui mekanisme internal dan eksternal, seperti rapat rutin, penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), serta audit oleh pihak berwenang. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap pengelolaan keuangan. Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan adanya keterpaduan antara perencanaan berbasis evaluasi mutu, pelaksanaan yang terstandar, serta evaluasi yang komprehensif dalam satu siklus manajemen keuangan yang saling terhubung. Integrasi tersebut berdampak pada meningkatnya ketertiban administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan madrasah yang transparan dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Ahmad, B., & Laha, M. S. (2020). *Implementation Of Field Studies To Improve Problem Analysis Ability (Case Study In The Student Sociology Iisip Yapis Biak)*. *Jurnal Nalar Pendidikan*, 8(1), 63. <https://doi.org/10.26858/jnp.v8i1.13644>
- Aprizal, Y. Z. (2023). Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) Melalui Aplikasi E-RKAM pada Madrasah di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Meuseuraya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 1.
- Arifudin, O., Sonia, N. R., & Darmawan, I. P. A. (n.d.). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Widina Bhakti Persada.
- Aryanto. (2024). *Pengantar Teori Manajemen Pendidikan Persekolahan*. UNISNU Press (Anggota IKAPI dan APPTI).
- Bagus Setiawan, & Shaleh, S. (2023). Akuntabilitas Sebagai Prinsip Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 171–176. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1765>
- Fauzi, M. N., & Suci, D. P. R. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Madrasah Aliyah Al-Amiriyah Blokagung Banyuwangi Tahun Pembelajaran 2021/2022. *Jurnal Tarbiyatuna: Jurnal Kajian Pendidikan, Pemikiran dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 3(2), 15–27. <https://doi.org/10.30739/tarbiyatuna.v3i2.1932>
- Gontor, U., Wicaksana, W., & Wicakasa, F. (2023). Implementasi Fungsi Manajemen George R Terry dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan. *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 3(1), 30–43. <https://doi.org/10.21776/ub.jcerdik.2023.003.01.04>
- Halim, A. (2018). *Mengelola Bantuan Operasioanal Sekolah Baik*.
- Haryono, E. (2021). *Institut Agama Islam (IAI) Al Muhammad Cepu*.
- Heliani, Wahidin, D., & Susilawati, E. (2022). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 56–65. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v2i2.45>
- Herman, L. (2022). *Penggunaan Aplikasi Sakti dalam Pengelolaan Anggaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton. 1*.
- Hidayatun, L., & Hanif, M. (2024). Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MI Muhammadiyah Lingasari. *Global: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 20–31. <https://doi.org/10.37985/w5fz6g93>
- Huriyah, L. (2023). *Pintar Mengelola Keuangan di Lembaga Pendidikan*. Penerbit Pena Cendekia.
- Iwan Sopwandin, Irawati Dewi, & Muhibbin Syah. (2020). Manajemen Partisipatif dalam Pengembangan Budaya Religius Peserta Didik: Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Idarah*, 5(2), 67–74. <https://doi.org/10.54892/jmpialidah.v5i2.75>
- Jasmine, S. F. (2023). Analisis Manajemen Keuangan SDN Kandangan III Surabaya. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 3(02), 231–240. <https://doi.org/10.57008/jjp.v3i02.440>
- Kurniati, D., & Hanif, M. (2024). *Manajemen Keuangan untuk Meningkatkan Akuntabilitas Sekolah di SD Negeri Semboja 02 Tegal. Vol.07 N0. 2*.

- Manullang, T. (n.d.). *Pengelolaan Manajemen Keuangan Sekolah pada Lembaga Pendidikan (Studi kasus: SMK N 1 Sidikalang)*.
- Nur, A. F., & Hanif, Muh. (2024). Digitalisasi untuk Transparansi Keuangan Sekolah di MTs Ma'arif NU 1 Sumbang. *Edutech : Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi*, 4(2), 67–74. <https://doi.org/10.51878/edutech.v4i2.3061>
- Nur, A., & Utami, F. Y. (2022). Proses dan Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah Literature Review. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya*, 3(1), 44–68. <https://doi.org/10.55623/ad.v3i1.109>
- Nuriah, F. S., & Deca. (2023). Pengelolaan dan Pengalokasian Dana di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Global Futuristik:Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin, Vol. 1 No. 2*.
- Nurul Widiana Amin, Eni Indriani, & Yusli Mariadi. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Mataram Tahun 2021. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 166–174. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.193>
- Rahayuningsih, D. A., & Syaflan, M. (n.d.). Upaya Sinkronisasi Rencana Penarikan Dana dengan Realisasi Anggaran Tahun 2022. *Jurnal Stie Semarang, Vol 16 No 3*, Oktober 2024.
- Rusdiana. (2019). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Pusat Penelitian Penerbitan UIN SGD Bandung.
- Rusdiana, & Kodir, A. (2022). *Pengelolaan Madrasah Diniyah Kontemporer*. Yayasan Darul Hikmah.
- Rusdiana, & Wardija. (2013). *Manajemen Keuangan Sekolah (Konsep, Prinsip, dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah)*. Arsad Press.
- Safitri, N., Alwi, M., & Albar. (n.d.). Akuntabilitas Keuangan Sekolah sebagai Upaya Transparansi Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Wonomulyo. *Jurnal E-bussiness Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar, Vol. 5 No. 1*.
- Sianturi, R. (n.d.). *Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Teknik*. Edu Publisher.
- Sumual, S. D. M. (2023.). *Teori dan Model Manajemen Pendidikan*. Ukit Press.
- Sutikno, M. S., & Hadisaputra, P. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Holistica Lombok.
- Uyun, S., Octavia, S. A., Muharom, A., & Hilaliah, L. (2020). *Manajemen Sekolah atau Madrasah Adiwiyata*. CV Budi Utama.
- Wahyudin, U. R. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, TRansparansi, dan Akuntabilitas)*. Deepublish Publisher.
- Widodo, T., Muhammad, I., Darmayanti, R., Nursaid, N., & Amany, D. A. L. (2023). Manajemen keuangan pendidikan berbasis digital: Sebuah kajian pustaka. *Indonesian Journal of Educational Management and Leadership*, 1(2), 146–167. <https://doi.org/10.51214/ijemal.v1i2.548>
- Zamrud, Q. T. (n.d.). *Manajemen Keuangan Pendidikan*. PT. Adab Indonesia.